

# RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023



DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN BANJARNEGARA

#### KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Rencana Kinerja Tuhnan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023. Penyusunan rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dispermades PPKB disusun untuk mewujudkan terelenggaranya pemerintahan yang baik, berdaya guna, berhasil guna, transparan, bersih dan bertanggungjawab.

Rencana Jinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 mengacu disusun sebagai pejabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan pada Rencana Strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan merupakan salah satu kewajiban Dispermades PPKB dalam merencanakan sasaran, program dan kegiatan yang akan dilaksanakan selama tahun 2023. Dokumen RKT Dispermades PPKB Tahun 2023 diharapkan dapat menjadi pedoman agar dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien guna meningkatkan capaian kinerja.

Akhirnya kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam menyusun Rencana Kinerja Tahunan ini. Semoga Rencana Kinerja Tahunan ini bermanfaat dalam pencapaian kinerja.

Banjarnegara, 31 Maret 2022

A DISPERMADES PPKB,

BUPATE BANJARNEGARA

HENDRO GAHYONO, SE, M.SI

NIP. 19681130 199703 1 007

## **DAFTAR ISI**

DAFTAR	IGANTARSI	i ii iii
BAB I.	PENDAHULUAN A. Latar Belakang	2
BAB II.	RENCANA KERJA TAHUNAN A. Tujuan Strategis	8
BAB III.	PENUTUP	17 17

## **DAFTAR TABEL**

Tabel.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispemades PPKB Tahun 2023-2026	8
Tabel.2	Sasaran Indikator Kinerja Dispemades PPKB Tahun 2023-2026	12
Tabel.3	Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2023	14

# BAB I PENDAHULUAN

#### A. LATAR BELAKANG

Terwujudnya Pemerintahan yang baik (*Good Governance*) merupakan tuntutan masyarakat yang mengharuskan pemerintah untuk menyelenggarakan manajemen pemerintahan yang transparan, partisipatif, akuntabel, berdayaguna dan berhasil guna serta bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Peraturan Presiden Republik IndonesiaNomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahmerupakan pedoman untuk penyelenggaraan pemerintahan yang lebih berdayaguna, berhasilguna, bersih dan bertanggung jawab dalam mencapai Visi dan Misi.

Guna memenuhi Penyelenggaraan Pemerintahan dimaksud, maka Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara yang dipimpin oleh Pejabat Eselon II, menyusun Dokumen Rencana Kinerja Tahunan tahun 2023 sebagai komitmen dalam melaksanakan pembangunan kurun waktu 1 ( satu ) tahun. Rencana Kinerja Tahunan (RJT) 2023 disusun sebagai upaya penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terencana dan sistematis dan dilaksanakan dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel.

Rencana Kinerja Tahunan ini merupakan proses penjabaran lebih lanjut dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dispermades PPKB Tahun 2023 - 2026. Penyususnan RKT meliputi sasaran strategis, sasaran program, sasaran kegiatan utama, indikator kinerja sasaran/indikator kinerja utama (IKU), dan target yang ingin dicapai dalam tahun uang bersangkutan, dengan melakukan penetapan sasaran, penyusunan indikator sasaran dan menetapkan target.

#### B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI DISPERMADES PPKB

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 99 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Banjarnegara.

Dispermades PPKB mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang pemberdayaan masyarakat dan desa, serta bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana yang menjadi kewenangan Daerah dan

tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Daerah. Dalam melaksanakan tugas, Dispermades PPKB menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- b. pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- c. pelaksanaan kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- d. pembinaan dan fasilitasi kebijakan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana;
- e. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pemerintahan desa, kelembagaan dan perencanaan partisipatif, pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan teknologi tepat guna, pengembangan kawasan perdesaan dan tata ruang perdesaan, pengendalian penduduk dan advokasi, serta keluarga berencana:
- f. pelaksanaan fungsi kesekretariatan dinas;
- g. pengendalian penyelenggaraan tugas UPTD; dan
- h. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan, sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### C. SUSUNAN ORGANISASI

Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara merupakan dinas Tipe A yang dipimpin oleh Kepala Setingkat Eselon II, dibantu oleh Sekretaris dan 5 (lima) Kepala Bidang (Eselon III) dan 12 (dua belas) Sub Koordinator dan 2 Sub Bagian sebagaimana tercantum dalam Peraturan Bupati Nomor 36 Tahun 2022. Susunan organisasi Dispermades PPKB terdiri dari:

- 1. Kepala Dinas.
- Sekretariat, terdiri atas :
  - a. Sub Bagian Keuangan
  - b. Sub Bagian Umum dan Keuangan;
  - c. Sub Koordinator Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan;
- 3. Bidang Pemerintahan Desa, Kelembagaan dan Perencanaan Partisipatif, terdiri dari :
  - a. Sub Koordinator Kelembagaan dan Aparatur Pemerintah Desa;

- b. Sub Koordinator Pengelolaan Aset dan Administrasi Desa;
- c. Sub Koordinator Lembaga Kemasyarakatan dan Perencanaan Pembangunan Partisipatif;
- 4. Bidang Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat dan Teknologi Tepat Guna
  - a. Sub Koordinator Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat
  - b. Sub Koordinator Pengembangan dan Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna;
- 5. Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Tata Ruang Perdesaan
  - Sub Koordinator Pengembangan Kawasan Perdesaan dan Infrastruktur Perdesaan;
  - b. Sub Koordinator Batas Desa dan Tata Ruang Perdesaan.
- 6. Bidang pengendalian Penduduk dan Advokasi;
  - a. Sub Koordinator Pengendalian Penduduk, Data dan Informasi;
  - b. Sub Koordinator Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi.
- 7. Bidang Keluarga Berencana
  - a. Sub Koordinator Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi;
  - b. Sub Koordinator Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga.
- 8. UPTD
- a. Kelompok Jabatan Fungsional.

#### D. VISI DAN MISI

Sebagai bagian dari tahapan pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005-2025, maka RPD Tahun 2023-2026 mempedomani RPJPD Tahun 2005-2025, khususnya tahapan keempat dalam penyusunannya. Untuk itu diperlukan pemahaman mengenai visi RPJPD Tahun 2005-2025. Visi merupakan rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.

Visi pembangunan dalam RPJPD Tahun 2005-2025 adalah:

#### BANJARNEGARA MAJU BERBASIS PERTANIAN

Misi merupakan pernyataan tentang rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Banjarnegara 2005-2025, terdapat penyederhanaan misi dalam RPJPD Tahun 2005-2025, sehingga misi menjadi sebagai berikut:

 Mewujudkan masyarakat madani yang agamis, dengan menciptakan masyarakat Banjarnegara yang berkualitas, sehat, cerdas, produktif, kompetitif, kreatif, inovatif dan berakhlak mulia, serta menghargai dan menerapkan nilai-nilai luhur agama dan budaya masyarakat.

- 2. Mewujudkan perekonomian rakyat yang maju dengan mengembangkan serta memperkuat perekonomian daerah melalui sektor pertanian yang berorientasi pada pasar dengan senantiasa menjaga kelestarian sumberdaya alam dan lingkungan dalam pengelolaannya melalui regulasi yang tepat dalam mendukung penciptaan iklim investasi yang kondusif dalam rangka menciptakan kehidupan masyarakat yang sejahtera, aman dan damai;
- 3. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab;
- 4. Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar.

Keterkaitan Visi dan Misi Kepala Daerah dengan rencana strategis Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara terdapat pada pelaksanaan :

- 1. Misi ke 3 (tiga) yaitu "Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab";
- 2. Misi ke 4 (empat) yaitu "Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar".

#### E. KETERKAITAN RKT DAN RENSTRA

Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan pada dokumen Rencana Strategis Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023-2026. Renstra menggambarkan tujuan jangka menengah, strategi-strategi, sasaran tahunan dan indikator kinerja tahunan/sasaran yang kemudian dijabarkan dalam rencana kinerja tahunan dan anggaran tahunan.

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaiman tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melakukan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih, agar lebih terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara beserta indikator kinerjanya disajikan dalam tabel berikut :

Tabel. 1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dispemades PPKB Tahun 2023-2026

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
Meningkatnya kinerja penyelenggaraa n pemerintahan daerah	1.1. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara an Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatkan akuntabilitas Perangkat Daerah	1. 1. Meningkatnya kualitas perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah
	1. 2. Meningkatnya pengelolaan penyelenggara an	1. 2. Meningkatkan Penataan Desa	1. 2. Meningkatnya Penyelenggaraan Penataan Desa	Jumlah Desa berstatus Mandiri

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
	pemerintahan desa			
		1. 3. Meningkatkan Kerjasama Desa	Meningkatnya fasilitasi kerjasama antar desa	
		1. 4. Meningkatkan pengelolaan administrasi Pemerintahan Desa	1. 4. Meningkatnya pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan administrasi Pemerintahan Desa	
		Meningkatkan pemberdayaan lembaga kemasyarakata, lembaga adat dan masyarakat hukum adat	1. 5. Meningkatnya pemberdayaan lembaga kemasyarakatan yang bergerak di bidang pemberdayaan desa dan lembaga adat tingkat daerah provinsi serta pemberdayaan masyarakat hukum adat yang masyarakat pelakunya hukum adat yang sama dalam daerah kabupaten/kota	
2. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	2. 1. Terkendalinya Angka kelahiran Total (TFR)	2. 1. Tertanganinya pengendalian penduduk	2. 1. Terlaksananya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk	Angka Kelahiran Total (TFR)
			2. 2. Terlaksananya pemetaan perkiraan pengendalian penduduk cakupan daerah kabupaten/ kota	
			Terlaksananya     pemetaan     keluarga beresiko     stunting	
		2. 2. Meningkatkan pembinaan Keluarga Berencana	2. 4. Terlaksananya Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan	

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
			Budaya Lokal	
			2. 5. Meningkatnya pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/ Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)	
			2. 6. Terlaksananya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi Serta Pelaksanaan Pelayanan KB Di Daerah Kabupaten/Kota	
			2. 7. Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB	
		2. 3. Meningkatkan pemberdayaan dan peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	2. 8. Terlaksananya pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga	Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)
			2. 9. Meningkatnya peran serta organisasi kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan Keluarga	
			2. 10. Meningkatny a kualitas pendampingan keluarga beresiko stunting	
Meningkatnya     efektivitas dan     transparansi     layanan publik	3. 1. Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	3. 1. Meningkatkan nilai indek kepuasan masyarakat	3. 1. Telaksananya administrasi keuangan perangkat daerah	Indeks Kepuasan Masyarakat

Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan	Indikator
1	2	3	4	5
			3. 2. Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum perangkat daerah	

#### **BAB II**

#### **RENCANA KINERJA TAHUNAN**

Penyusunan dokumen RKT 2023 ini mengacu pada Renstra Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara 2023-2026. Rencana Kinerja Tahunan ini memuat informasi tentang tujuan strategis dan sasaran strategis, indikator kinerja serta rencana target kinerja Tahun 2023.

#### A. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah suatu kondisi yang diinginkan/direalisasikan pada waktu yang telah ditentukan. Tujuan tidak mesti berwujud secara kuantitatif tetapi juga bisa dalam bentuk kualitatif. Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara mempunyai tujuan sasaran strategis antara lain sebagai berikut:

- 1. Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan desa;
- 3. Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
- 4. Meningkatnya kualitas layanan publik.

#### B. SASARAN STRATEGIS DAN IKU SERTA TARGET PROGRAM KEGIATAN POKOK

#### 1. Sasaran Strategis

Sasaran strategis merupakan penjabaran lebih lanjut dari tujuan, yang dirumuskan secara spesifik dan terukur untuk dapat dicapai dalam kurun waktu lebih pendek dari tujuan. Sasran merupakan ukuran pencapaian dari tujuan.

Sasaran strategis pertama untuk tujuan meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan perangkat daerah adalah

Sasaran strategis kedua yaitu meningkatnya pegelolaan penyelenggaraan pemerintahan desa adalah

Sasaran strategis ketiga dalam rangka terkendalinya angka kelahiran total adalah Sasran strategid keempat dalam rangka meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik.

#### 2. Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah ukuran kebersihan dari suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi. Penetapan IKU atau *key performance* bertujuan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan ki erja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Indikator Kinerja utama Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara antara lain:

- 1. Nilai SAKIP Perangkat Daerah;
- 2. Jumlah Desa Berstatus Mandiri;
- 3. Angka Kelahiran Total (TFR);

- 4. Angka kelahiran Remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19);
- 5. Indeks Kepuasan Masyarakat.

#### 3. Target Program Kegiatan Pokok

Rencana tingkat capaian/target harus ditetapkan secara realistis dan relevan sesuai dengan kemampan organisasi. Target digunakan untuk mengukur keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, beberapa program yang akan dilaksanakan antara lain:

- 1. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- 2. Program Penataan Desa;
- 3. Program Peningkatan Kerjasama antar Desa;
- 4. Program Administrasi Pemerintahan Desa;
- Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat;
- 6. Program Pengendalian Penduduk;
- 7. Program Pembinaan Keluarga Berencana;
- 8. Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Berencana (KS).

Penetapan sasaran dan indikator kinerja mencapai tujuan Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023, dijabarkan sebagai berikut :

Tabel. 2. Sasaran Indikator Kinerja Dispemades PPKB Tahun 2023-2026

Tu	ijuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan		
	(1)			(3)	(5)		
1.	Meningkatnya kinerja penyelenggara an pemerintahan daerah	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraa n Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja	Terfasilitasinya Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		
2.	Meningkatkan kualitas penyelenggara an pemerintahan desa	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraa n pemerintah desa	Jumlah desa berstatus mandiri	Terwujudnya penataan desa	Terlaksaanya penyelenggaraan penataan desa		
				Meningatnya kerja sama antar desa	Terlaksananya Fasilitasi Kerja Sama antar Desa		
					Terlaksananya fasilitasi pengembangan kawasan perdesaan		
				Menigkatnya kualitas pengelolaan desa	Meningkatnya pengelelolaan administrasi pemerintahan desa		
					Terlaksananya penetapan dan penegasan batas desa		
					Meningkatnya pemberdayaan BUMDes		
				Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan,	Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan		

Τι	ıjuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
	(1)		Jasaran	(3) Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum Adat	(5) Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota
				Meningkatnya pemberdayaan ekonomi perdesaan	Meningkatnya pengembangan usaha ekononi Masyarakat
					Meningkatnya pemanfaatan Teknologi Tepat Guna
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	Terkendalinya angka kelahiran total	Angka kelahiran total (TFR)	Meningkatnya Pengendalian Penduduk	Meningkatnya Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dalam Rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk
					Terlaksananya Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota
					Meningkatnya Perangkat Daerah (dinas/badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB
					Meningkatnya Cakupan keluarga berisiko stunting yang memperoleh pendampingan
				Meningkatnya Pembinaan Keluarga Berencana	Meningkaytnya Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal
					Meningkatynya Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)
					Meningkatnya Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota
					Terlaksananya pelayanan KB Terlaksananya pembinaan KB
					Meningkatnya Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB
				Terlaksananya Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Meningkatnya Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga
4.	Meningkatnya efektivitas dan transparansi layanan publik	Meningkatnya kualitas layanan masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	Meningkatnya pelayanan penunjang urusan pemerintah daerah	Terlayaninya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
					Terlayaninya Administrasi Umum Perangkat Daerah Tersedianya Jasa Penunjang
					Urusan Pemerintahan Daerah Terlaksananya Pengadaan
					Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah

Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Sasaran Program	Sasaran Kegiatan
(1)			(3)	(5)
				Daerah
				Terlaksananya Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Sedangkan untuk rencana tingkat capaian/target untuk mengukur keberhasilan kinerja yang telah ditetapkan dapat dilihat dalam Rencana Kinerja Tahunan 2023 sebagaimana tercantum tabel sebagai berikut:.

# RENCANA KINERJA TAHUNAN 2023 DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA

# Tabel. 3. Rencana Kinerja Tahunan Dispermades PPKB Tahun 2023

Sasaran Strategis		Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan Perangkat Daerah	1) Nilai SAKIP Perangkat Daerah	77	Program Penunjang Urusan     Pemerintah Daerah     Kabupaten/Kota	Persentase penyusunan dokumen perencanaan dan laporan capaian kinerja	100%
2.	Meningkatnya pengelolaan penyelenggaraan pemerintah desa	Jumlah desa berstatus mandiri	3 Desa	1) Program Penataan Desa	Swadaya masyarakat terhadap program pemberdayaan Masyarakat	37.00 %
				Program Peningkatan     Kerjasama antar Desa	Jumlah kerjasama antar desa	4 Dokumen
				3) Program Administrasi Pemerintahan Desa	Persentase Desa yang terfasilitasi pembinaan pengelolaan administrasi desa	100%
					Persentase desa yang terfasilitasi penetapan dan penegasan batas desa	50%
					Jumlah BUMDes yang berkembang	6 BUMDes
				4). Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat, dan Masyarakat Hukum AdaT	Persentase lembaga kemasyarakatan yang berpartisipasi aktif dalam program pemberdayaan Masyarakat	45%

	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Target	Program	Indikator Kinerja Program	Target
	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3.	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	1) Angka kelahiran total (TFR)	2,08%	1) Program Pengendalian Penduduk	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	2 Dokumen
					Cakupan penyediaan data mikro keluarga di setiap desa/kelurahan	100%
				Perogram Pembinaan     Keluarga Berencana	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15-49	76.59%
					Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	30.65%
					Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	100%
					Persentase penggunaan kontrasepsi jangka panjang (MKJP)	32.58%
					Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmeet need)	6.96%
		2) Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15-19) per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun (ASFR 15-19)	22,36%	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS)	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	75.99%

	Sasaran Strategis	Ind	dikator Kinerja S	Sasaran	Target		Program		Indikator Kinerja Program	Target
	(1)		(2)		(3)		(4)		(5)	(6)
									Cakupan anggota Bina Keluarga	61.5%
									Remaja (BKR) ber-KB	
									Cakupan anggota Bina Keluarga	36.7%
									Lansia (BKL) ber-KB	
									Cakupan PUS peserta KB	50.72%
									anggota Usaha Peningkatan	
									Pendapatan Keluarga Sejahtera	
									(UPPKS) yang ber-KB Mandiri	
									Cakupan Remaja dalam Pusat	10%
									Informasi dan Konseling	
									Remaja/Mahasiswa	
4.	Meningkatnya kualitas	1)	Indeks	kepuasan	83	1)	Program Penunjang	Urusan	Persentase pemenuhan	100%
	layanan masyarakat		masyarakat				Pemerintah	Daerah	penunjang urusan pemerintah	
							Kabupaten/Kota		daerah yang dipenuhi	

# BAB III

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Dispermades PPKB Kabupaten Banjarnegara Tahun 2023 diselenggarakan sebagai dasar penyusunananggaran Tahun Anggaran 2023 sekaligus merupakan komitmen yang ingin diwujudkan (*target setting*) oleh pimpinan dan seluruh jajaran staf Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara.

Renstra tahun 2023-2026 yang memberikan gambaran detail mengenai sasaran yang ingin dicapai dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu satu tahun. Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) Tahun 2023 ini diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman guna mempertahankan dan atau meningkatkan capaian kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara serta meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan program/kegiatan dalam mencapai target kinerja.

Dengan tersusunnya Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT) ini diharapkan dapat memberi gambaran kinerja Dispermades PPKB Kab. Banjarnegara sehingga dapat Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance) dalam kehidupan politik yang demokratis dan bertanggung jawab dan Mewujudkan kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana dasar sebagaimana tertuang dalam Misi 3 dan 4 yang tertuang dalam RPJPD Kabupaten Banjarnegara Tahun 2005-2025.

Akhirnya semoga dokumen ini bermanfaat dan dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Banjarnegara, 31 Maret 2022

KEPALA DISPERMADES PPKB KABUPATEN BANJARNEGARA

HENDRO CAHYONO, SE, M.SI

Pembiha Tingkat I NIP. 19681130 199703 1 007